

**PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH (BOSDA) DAN KINERJA KEPALA SEKOLAH TERHADAP
GURU SEKOLAH DASAR UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR SISWA DI DAERAH PINGGIRAN DAN TERPENCIL
KABUPATEN SORONG**

Jusmin

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Guru Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Daerah Pinggiran dan Terpencil Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis Jalur (*Path Analysis*). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 2.000 Siswa Sekolah Dasar yang berstatus negeri maupun swasta yang tersebar di daerah pinggiran dan terpencil Kabupaten Sorong. Penarikan sampel menggunakan teknik Slovin yang berjumlah 400 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket sedangkan analisis menggunakan Analisis statistik deskriptif dan Analisis statistik inferensial statistika. Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dimasukkan dalam jurnal nasional, sehingga dapat menjadi sebuah referensi tersendiri bagi peneliti lainnya

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah Daerah, Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Prestasi Belajar Siswa.

PENDAHULUAN

Otonomi khusus yang diberlakukan bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua, karena itu diharapkan terjadi peningkatan pada

berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang pendidikan. Pemerataan pendidikan mencakup *equality* (persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan) dan *equity* (keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan). Akses terhadap pendidikan disebut merata jika semua penduduk usia sekolah, telah mendapat kesempatan

pendidikan dan disebut adil jika antar kelompok dalam masyarakat dapat menikmati pendidikan secara merata.

Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah sedang berupaya membangun sekolah-sekolah kemudian memberikan fasilitas sekolah khususnya bagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan bahkan bukan hanya fasilitasnya saja melainkan tenaga pengajar juga. Selain itu khususnya di Kabupaten Sorong sendiri adanya instruksi dari Bapak Bupati bahwa setiap sekolah tidak dibebani dengan biaya sekolah dalam arti Pendidikan gratis, tentu hal tersebut sangat membantu masyarakat Papua dalam menyekolahkan anaknya serta membantu meringankan beban orang tua.

Pengaruh kebijakan Otonomi Khusus bagi pendidikan di Kabupaten Sorong sangat besar karena dengan adanya program bantuan dana operasional sekolah daerah (Bosda) sangat membantu sekolah-sekolah

yang ada di Kabupaten Sorong. Dengan adanya Bosda orang tua tidak dibebani dengan biaya sekolah seperti: pendaftaran siswa baru, pakaian seragam, uang ujian sekolah dan sebagainya. Di sisi lain juga bantuan dana operasional sekolah ini juga bermanfaat bagi guru-guru misalnya: Pembayaran honor wali kelas, honor Guru piket, honor kelebihan jam mengajar, honor penulisan rapor, honor jasa kebersihan sekolah dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tentang BOSDA maka dibutuhkan kinerja kepala sekolah yang memberikan makna yang positif terhadap pengembangan sumber daya dan prestasi sekolah. Betapapun sempurnanya Bantuan Bosda, tetapi jika kepala sekolah hanya merasa sebagai pelaksana saja, tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pendidikan, maka keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di sekolah akan sulit untuk terwujud. Kompetensi kepala sekolah yang berkualitas akan memberikan kontribusi terhadap iklim, suasana dan

budaya mutu guru. Manifestasi suasana dan budaya kerja sekolah tersebut pada akhirnya akan mendorong terciptanya kinerja guru yang baik sehingga akan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Apabila diperhatikan sekilas kebijakan tersebut, terlihat memang bantuan tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat. Namun demikian terdapat sejumlah variabel lain yang patut diperhatikan dan menjadi pertimbangan terutama bagi para pembuat kebijakan yaitu pengaruh pelaksanaan kebijakan Bosda dan kinerja kepala sekolah tersebut antara lain terhadap : guru, dan Prestasi belajar siswa. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut, mengingat besarnya dana yang telah dan harus dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan implementasi program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan tersebut diatas dengan judul : “Pengaruh Kebijakan Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Guru Sekolah Dasar untuk meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Daerah Pinggiran dan Terpencil Kabupaten Sorong”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Penelitian ini termasuk penelitian *ex-post facto* (bahasa latin “setelah fakta”) yang bersifat kausalitas. Tugas peneliti terbatas pada kegiatan pengamatan, pencatatan dan identifikasi tentang variabel bebas yang berkaitan dengan variabel tidak bebas. Penelitian *ex-post facto* disini dirancang untuk menerangkan adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara: Kebijakan Bosda, Kinerja Kepala Sekolah, guru, terhadap Prestasi Belajar siswa.

Teknik pengambilan sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive

Sampling, yaitu penarikan sampel secara langsung dengan pertimbangan bahwa fokus sampel diambil dari daerah pinggiran dan terpencil Kabupaten Sorong. (Sugiyono, 2012: 122).

Teknis Alat Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan statistic inferensial. Sedangkan teknik statistik inferensial digunakan untuk analisis dan validasi model yang diusulkan serta menguji hipotesis penelitian.

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data yang diperoleh. Analisis statistik dengan bantuan program statistika SPSS 22.0.

2. Analisis statistik inferensial

Analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk analisis dan

validasi model yang diusulkan serta pengujian hipotesis. Untuk keperluan pengujian hipotesis digunakan Metode Analisis Jalur (*Path Analysis*).

Hubungan kausal seperti ini membutuhkan analisis yang mampu menjelaskan secara simultan tentang hubungan tersebut sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur. Dalam teknik analisis jalur ini, proses analisis data menggunakan bantuan paket program *Microsoft Excel 2007*, dan *AMOS (Analysis of Moment Structure)* versi 22.0.

PEMBAHASAN

1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal

dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep dari kebijakan, maka kebijakan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu lingkup tindakan/kegiatan aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan juga menciptakan kesempatan-kesempatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dan dilaksanakan baik pemerintah sendiri atau kelompok lain untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

2.1. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sorong Tahun 2014. Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong kepada satuan

pendidikan forma jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan untuk memenuhi/melengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.

Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan biaya operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah melalui Dana Otsus. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri dan meringankan beban biaya operasional sekolah swasta di jenjang pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA), meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah SD, SMP dan SMA, meringankan beban biaya operasional sekolah SD, SMP dan SMA,.

Sasaran bantuan operasional sekolah daerah meliputi yaitu alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, SD, SMP dan SMA. Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolah negeri dan meringankan beban biaya operasional sekolah swasta di jenjang pendidikan

dasar, Kualitas pendidikan dasar negeri/swasta semakin meningkat.

2.2. Tinjauan Kinerja Kepala

Sekolah

Menurut Riduwan (2013:85), Kepala sekolah merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator*. Ketujuh tugas dan fungsi kepala madrasah harus dilakukan sebagai pendidik dan memberikan contoh teladan kepada para guru, staf dan siswa. Menurut Suhardiman (2012:26), Kinerja kepala sekolah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. Menurut Suhardiman (2012:116), Adapun kriteria kinerja kepala sekolah yaitu Mampu menyusun perencanaan sekolah, Mampu mengelola sarana dan prasana sekolah, Mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, Mampu membina hubungan kerja yang harmonis, Mampu memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga/instansi lain Mampu

mengelola administrasi sekolah dan hubungan sekolah masyarakat.

Berdasarkan konsep kepala sekolah di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah dikatakan baik, jika target atau tujuan sekolah dapat dicapai.

2.3. Tinjauan Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen: —guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Priansa (2014:79) mengungkapkan bahwa kinerja guru merupakan tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja, mulai dari perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas dan proses evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa.

Adapun peran dan fungsi guru menurut Mulyasa (2012:19) adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pendidik dan pengajaran, bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan siswa, bersikap realitas, jujur dan terbuka serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas menguasai berbagai jenis pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. (2) Sebagai pengelola pembelajaran, bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. (3) Sebagai administrator, setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin serta memahami strategi dan manajemen pendidikan. (4) Sebagai pemimpin, bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia,

teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah. (5) Sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Seorang guru harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.

2.4. Tinjauan Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yakni ‘prestasi’ dan “belajar” yang mempunyai arti yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI, menyatakan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, diselesaikan dan sebagainya). Definisi belajar, menurut pendapat Oemar (2008), belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu mengalami. Menurut

Muhibbin Syah (2008 : 141), “Prestasi belajar merupakan hasil dari sebagian faktor yang mempengaruhi proses belajar secara keseluruhan.”

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan motorik) seperti penguasaan, penggunaan dan penilaian berbagai pengetahuan dan ketrampilan sebagai akibat atau hasil dari proses belajar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang tertuang dalam bentuk nilai yang di berikan oleh guru.

KESIMPULAN

Kebijakan Bantaun Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Sorong mendapat berbagai apresiasi dari berbagai kalangan karena Kabupaten Sorong yang pertama melakukan kebijakan tersebut di Provinsi Papua Barat. Terkait penggunaan dana Bosda berasal dari 20 persen pos pendidikan dana Otsus, dari kebijakan pemerintah daerah. Dana Bosda tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah,

namun juga untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan aktifitas belajar mengajar, baik guru dan keperluan sekolah. Besarnya dana Bosda ke setiap sekolah berbeda-beda, tergantung sedikit banyaknya murid. Kebijakan Bosda untuk mengimbangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil, sehingga seluruh anak-anak di Kabupaten Sorong dapat menikmati pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta
- Ghozali dan Fuad. 2008. *SEM Teori dan Konsep dengan Program LISREL 8.80*. Semarang: BP-Undip.
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*. Bandung: ALFABETA.
- Kusnendi. 2008. *Model-model Persamaan Struktural (satu dan multigrup Sampel dengan LISREL)*. Bandung: Alfabeta.
- Muhibin Syah. (2008).*Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT.Remaja Rosda karya.
- Mulyasa. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: REMAJA POSDAKARYA.
- Oemar Hamalik (2008). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Priansa, Donni Juni. 2014. *Kinerja dan Profesionalisme Guru*. Bandung: ALFABETA.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmawati, Tutik. 2013. *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SEM Menggunakan AMOS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiono. (2012). *Metode penelitian bisnis* . Bandung: Penerbit CV Alfa Beta
- sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Cv Alfa Beta.
- Suhardiman, Budi. 2012. *Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surya, Mohamad. 2014. *Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen

UU Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001.

Juknis, Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014.